



Fungsi Administrasi Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah

Zainuddin¹, Ari Putra², Isbon Pageno³

E-Mail : Zainzainuddin35@gmail.com¹

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan – Palu^{1,2}
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako³

Abstract

The purpose of this study was to analyze the administrative function of the Regional Financial and Asset Management Agency of the Central Sulawesi Governor's Office, the number of informants in this study was 5 (five) people who were leaders and staff.

The method used in this research is qualitative. The data collected in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained through interviews with informants related to the research. Interviews were conducted using interview guidelines and interviews conducted in this study to obtain qualitative information that can strengthen qualitative analysis.

The results showed that the administrative function of the Regional Financial and Asset Management Agency of the Central Sulawesi Governor's Office was running well, but there were still obstacles where the employees who were placed were not in accordance with their expertise or knowledge, and needed improvements in organization and planned supervision.

Keywords: *Financial Administration Function, Planning, Organizing, Actuating, Controlling.*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan usaha yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Arah dan tujuan pembangunan ini dalam pencapaiannya menghendaki adanya dukungan berbagai faktor sebagai dasar untuk mengembangkan diri secara optimal dalam melaksanakan pembangunan perlu didukung oleh aparat yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan pembangunan tersebut hanya akan dicapai melalui perencanaan secara terarah realitas serta dilaksanakan secara bertahap, sungguh-sungguh, sehingga dapat

berhasil guna dan berdaya guna. Pembinaan penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah selaku aparatur negara, perlu dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meningkatkan kemampuan, pengabdian disiplin dan keteladana. Sejalan dengan itu, aparatur pemerintah harus semakin mampu semakin mampu melayani, mengayomi, serta menimbulkan melayani, mengayomi, ser pemeta menimbulkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta tanggapan terhadap pandangan – pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kehidupan organisasi, dalam melaksanakan tugasnya, bawahan sering berperilaku tidak sesuai dengan tujuan yang

telah ditentukan. Hal ini terjadi karena adanya tekanan batin dari dalam diri para bawahan, sehingga sangat terpengaruh motivasi sebagai fungsi administrasi dan manajemen. Ini berarti pembinaan dan pendayagunaan aparatur pemerintah merupakan bagian dari usaha untuk menyatukan proses pencapaian tujuan. Prilaku yang berbeda dari setiap pegawai, sebagai individu dapat dilihat dari tingkat prestasi kerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Peningkatan kualitas dan pendayagunaan aparatur Negara/Pemerintah merupakan kesiapan dan peraturan aparatur pemerintah. Karena itu, aparatur negara dituntut memiliki keahlian dalam melaksanakan tugasnya, sehingga penghargaan yang diberikan kepada seseorang pegawai tumbuh atas dasar karier dan bukan dari segi sosialnya. Karena ini fungsi motivasi bagi pegawai untuk mau berkerja lebih meningkat ditumbuhkan atas dasar karier, pengabdian dan profesionalisme serta prestasi kerja dan usaha aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan merupakan manifestasi keberhasilan dari pengelolaan keuangan daerah, yang sangat ditentukan oleh fungsi administrasi serta ditunjang dengan motivasi kerja pengelolaannya. Keberhasilan pengelolaan keuangan yang profesional oleh ahlinya maka pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini tidak akan berjalan dengan baik. Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dimana daerah baik daerah kota maupun kabupaten tidak perlu gembira dan bangga ketika diberikannya kesempatan (kewenangan) yang seluas luasnya untuk mengatur semua urusan yang ada di daerah tersebut akan tetapi hal itu akan menjadi beban dana tanggung jawab yang paling

berat buat pemerintah untuk dilaksanakannya.

Pengelolaan keuangan termaksud penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pedoman akan memberikan suatu petunjuk serta arah terhadap pertanggungjawaban keuangan.

Dalam penyusunan anggaran dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan anggaran yang tersedia dengan penyesuaian dan perubahan, namun masih sering terjadi hambatan dalam penyusunan anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, karena masih banyak pengelola anggaran yang belum memahami sistem penyusunan anggaran yang sebenarnya, karena pegawai yang ditempatkan menjadi pengelola anggaran bukan bidang ilmunya, selain itu sering terjadi mutasi secara tiba-tiba tanpa analisis kebutuhan bidang atau biro, selain itu birokrasi keuangan cukup berbelit-belit apalagi dengan adanya peraturan baru yaitu pengelolaan keuangan satu pintu.

Administrasi sendiri merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dalam keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Sondang P. Siagian, 2003). Lebih lanjut The Liang Gie (2003) menjelaskan bahwa administrasi adalah serangkaian kegiatan pentaan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.

Adapun fungsi-fungsi administrasi sebagai mana dikemukakan oleh G.R Terry adalah :

1. Planning (perencaan)

Perencaan (Planning) merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu proses

kegiatan dalam mencapai tujuan sehingga kegiatan tersebut memiliki gambaran yang akan terjadi nantinya. Walaupun demikian perencanaan tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan selalu ada hal-hal yang tidak terduga nantinya sehingga perencanaan harus benar-benar mampu memberika jalan bagi masalah tersebut.

Perencanaan merupakan syarat mutlak bagi setiap kegiatan admnitration. Tanpa perencanaan, pelaksana suatu kegiatan akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Hadari Nawawi (2015) Perencanaan pada dasarnya berarti persiapan menyusun suatu keputusan berupa langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan.

Sodang P. Siagian (2010) bahwa *Planning* atau perencanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang akan dikerjakan dimana yanag akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dalam perencanaan terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh agar dalam merealisasikan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan dianggap perlu karena ini merupakan proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tujuan.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian (*organizing*) adalah tindakan mengusahkana hubungan-hubungan kegiatan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat berkerja sama secara efisien dan demikian memperoleh kepasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungna tertentu guna mencapai tujuan atau sasarantertentu.

Sondang P. Siagian (2010) organisasi adalah segala bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama

untuk suatu tuuan bersama dan terikat secara formal.

3. Actuating (Menggerakkan)

Menurut G.R Terry (2010) *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran, baik sasaran perusahaan maupun sasaran anggota perusahaan tersebut, oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran tersebut.

4. Controlling (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat dirahkan kejalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula.

Menurut Moekijat (1989), kinerja merupakan hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Kinerja itu dapat berarti pula, berupa produk akhir (barang dan jasa) dan atau berbentuk perilaku, kompetensi, sarana dan keterampilan spesifik yang dapat mendukung pencapaian tujuan yang menjdi sasaran sebuah organisasi. Sedangkan Menurut Alewine (dalam Nawawi, 2002), standar kinerja dapat dibuat dari uraian jabatan untuk mengaitkan definisi jabatan statis ke kinerja kerja dinamis. Standar kinerja juga dibuat untuk setiap individu dengan berpedoman pada uraian jabatan. Setiap karyawan mengusulkan sasarannya sendiri kepada pimpinan secara tertulis, bila keduanya menyepakati setiap sasaran, kemudian dapat dibuat pernyataan sasaran secara tertulis

METODE

Metode yang digunakan dalam tulisan ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan salah satu

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Artinya peneliti kualitatif adalah peneliti yang menggambarkan suatu kejadian yang diamati melalui ucapan, tulisan, dan tingkah laku (Bogda dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi, 2008). Lebih lanjut, Hadjar (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya secara umum terhadap kenyataan sosial dari persektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum untuk yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

Penentuan informan pada penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*. *Purposive* menurut Sugiyono (2011) adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Pengertian tersebut dapat dikatakan sebagai teknik penentuan informan secara sengaja oleh peneliti dan dianggap mengetahui masalah yang akan diteliti. Adapun jumlah informan yang ditetapkan dan dilibatkan dalam penelitian ini yaitu : 1). Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2).Sekretaris; 3). Kepala Bidang; 4). Kepala Sub-bagian, dan; 5). Staf.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 1). Data Primer : Data yang diperoleh langsung dari para informan yang dilakukan melalui wawancara. 2). Data Sekunder : Data pendukung yang bersumber dari obyek penelitian, buku (keperpustakaan), atau pihak-pihak lain yang memberikan data yang erat kaitanya dengan obyek dan tujuan penel, buku-buku, majalah, internetian yang berasal dari dokumen, buku-buku, majalah, internet dan

jurnal. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini antara lain:

1. Observasi : proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sutrisno Hadi dalam Sugiyono, 2010). Observasi dilakukan dengan maksud untuk melakukan pengamatan secara langsung mengenai kondisi dan aktifitas Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan Kantor Gubernur Sulawesi tengah dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola keuangan
2. Wawancara : Moleong (2010) menjelaskan bahwa wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
3. Dokumentasi : Dokumentasi sendiri ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian (Riduwan, 2010).

Analisa data yang diperoleh dari hasil penelitian ini baik data primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersama dengan proses pengumpulan data. Adapun teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Humberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008) yaitu : 1). Reduksi Data; 2). Penyajian Data, dan; 3). Penarikan Kesimpulan (Verifikasi).

PEMBAHASAN

Fungsi Administrasi sangat berperan dalam pencapaian tujuan kegiatan yang diinginkan oleh organisasi baik pemerintah

maupun swasta. Penyelenggaraan yang dilaksanakan tanpa melalui proses administrasi maka akan mendapatkan masalah yang tidak akurat serta tidak efektif dan efisien sesuai kegiatan tersebut.

Dalam melakukan suatu pekerjaan hendaknya seorang pegawai harus mampu dan mengerti peranan yang dibawahnya sehingga proses administrasi keuangan dapat berjalan sesuai tujuan dan keinginan organisasi. Dengan demikian maka fungsi administrasi keuangan yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya aspek *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (menggerakkan), dan *Controlling* (Pengawasan).

1. *Planning* (Perencanaan)

Planning (Perencanaan) merupakan gambaran proses kegiatan yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah yang dapat memberikan proses tujuan yang efisien. Oleh karena itu dibutuhkan fungsi administrasi keuangan yang tepat yang mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa fungsi administrasi dalam kegiatan *planning* (perencanaan) telah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program kerja yang telah disepakati atau yang telah direncanakan sebelumnya. Pengamatan penulis dilokasi penelitian, menunjukkan proses penyusunan anggaran serta pembahasannya selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan serta pedoman penyusunan. Fungsi administrasi tersebut berjalan sesuai dengan kebutuhan serta tujuan yang diinginkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berjalannya fungsi administrasi di badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kantor Gubernur Sulawesi Tengah tidak

terlepas dari sumber daya yang ada dimana pegawai mayoritas berpendidikan sarjana, sehingga dapat menunjang berjalannya fungsi administrasi dari segi perencanaan pengelolaan keuangan. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dalam menyusun perencanaan keuangan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengamatan penulis melihat meskipun perencanaan yang telah disusun berdasarkan peraturan pemerintah yang mengacu pada jangka panjang, menengah dan tahunan, masih ada pula pegawai yang belum mengerti tentang proses kegiatan perencanaan yang akan disusun tersebut, sehingga terjadi kendala dikala pegawai selaku pelaksana kegiatan tersebut berhalangan, maka proses penyusunan perencanaan akan terhambat pula.

Berdasarkan uraian diatas penulis menganbil kesimpulan bahwa *Planning* (Perencanaan) sebagai fungsi administrasi akan tercapai jika pegawai dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta mendapatkan motivasi dari pimpinan untuk dapat lebih mengembangkann sumber daya pegawai yang ada di Badan Pengelolaan Keuanagn dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, karena menurut penulis, meskipun perencanaan telah ditentukan namun dasar pemahaman pegawai belum baik maka kegiatan perencanaan tersebut akan terhambat pula.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pelaksanaan fungsi administrasi keangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sualwesi Tengah, dalam menjalankan proses administrasi tidak lepas dari tupoksi masing-masing pegawai. Organisasi dalam proses pelaksanaan fungsi admnistrasi sebagai bentuk untuk menempatkan pegawai sesuai tugas dan disiplin ilmu setiap pegawai.

Bidang administrasi dalam hal ini sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagai penunjang dari proses setiap kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, yang berkewajiban untuk menempatkan pegawai yang berkompeten dibidangnya guna tercapainya fungsi administrasi yang baik.

Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, secara umum telah berjalan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang organisasi perangkat daerah, namun demikian masih perlu pembenahan dari tata kelola keuangan tersebut. Uraian tersebut sesuai dengan pengamatan penulis, dimana pengamatan penulis yang dilakukan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa masih adanya pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta masih adanya pegawai yang kurang memahami tugas pokok serta fungsi yang diberikan kepadanya.

Pengorganisasian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, disusun berdasarkan atauran yang jelas yaitu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Ini menunjukkan bahwa fungsi administrasi dalam hal pengorganisasian dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut diungkapkan bahwa pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, telah ditempatkan sesuai bidang tugasnya masing-masing sehingga fungsi administrasi dapat berjalan sesuai rencana serta tujuan yang telah ditentukan.

Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sudah ditempatkan sesuai dengan bidang tugasnya namun masih perlu pembenahan kembali, ini menandakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dalam

menjalankan fungsinya pengorganisasian dalam pelaksanaan kegiatan fungsi administrasi sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu pembenahan kembali. Pengamatan penulis selama di lokasi penelitian, bahwa pegawai di Kantor Badan Pengelollan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, telah bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing namun masih ada juga pegawai yang tidak melakukan aktivitasnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan serta analisis yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi administrasi dalam hal pengorganisasian di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan bentuk penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang ilmunya, merupakan bentuk penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang ilmunya, sedangkan jika dilihat dari motivasi pegawainya dalam peningkatan sumber daya pegawai masih perlu mengikutsertakan pegawai untuk dapat melakukan pendidikan dan pelatihan, sehingga pelaksanaan fungsi administrasi pada Badan Pengelollan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

3. *Actuating* (Menggerakkan)

Actuating (Menggerakkan) yang merupakan suatu fungsi pembimbingan dan pemberian pimpinan serta menggerakkan pegawai di Badan Pengelollan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah sesuai dengan latar belakang ilunya agar lebih giat lagi dalam melakukan kegiatan pelaksanaan fungsi administrasi. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah sangat berperan penting. Sebab walaupun perencanaan telah matang serta rapi dan pengorganisasian telah berjalan sesuai dengan prinsipnya masing-masing, namun menggerakkan pegawai merupakan

salah satu unsur yang penting untuk dilaksanakan. Menggerakkan pegawai dalam bekerja agar mereka suka dan mau bekerja dapat mengandung arti untuk dapat menjadikan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah sadar akan tugas yang diembankan kepadanya serta melaksanakan dengan rasa tanggung jawab tanpa menunggu perintah dari pimpinan.

Pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan sasaran yang diinginkan. Dalam hal ini *actuating* (menggerakkan) sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dimana pegawai dalam melaksanakan tugas dapat melaksanakannya dengan baik dan rasa tanggung jawab. Pengamatan penulis selama di lokasi penelitian, pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, sudah bergerak melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya demikian masih ada pula pegawai yang acuh tak acuh dengan bidang tugasnya. Lebih lanjut diketahui pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, sudah melaksanakan tugas dengan baik tanpa harus di perintah oleh pimpinan serta melakukan pekerjaan tersebut se profesional mungkin yang bisa dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan seluruh informan diketahui bahwa *actuating* (menggerakkan) sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga pegawai dapat melaksanakan tugasnya dan dapat bertanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maka menggerakkan pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang diinginkan, walaupun masih ada pula pegawai yang belum melaksanakan tidak sesuai keinginan pimpinan.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling (pengawasan) yaitu untuk mencegah serta memperbaiki setiap kesalahan yang dilakukan oleh seorang pegawai dalam melakukan kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pegawai yang melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selalu mendapatkan pengawasan dari pimpinan, sehingga dalam melaksanakan tugas diharapkan tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan berdampak pada pelayanan yang dilakukan oleh seorang pegawai, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan serta tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.

Penulis melihat bahwa pengawasan internal dilakukan terhadap pegawai yang melaksanakan kegiatan hanya dilakukan setelah akhir tahun, sehingga kesalahan yang didapat dalam pertanggung jawaban administrasi keuangan tersebut menjadi temuan oleh pemeriksa dalam hal ini inspektorat. Kejadian ini menjadi rancu karena proses perbaikan pertanggung jawaban tidak bisa lagi diperbaiki, akhirnya pegawai yang melaksanakan tugasnya harus mengembalikan ke kas Negara, ini yang menjadi kendala pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis menunjukkan bahwa fungsi administrasi dalam hal pengawasan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, telah berjalan dengan baik, namun demikian pelaksanaan pengawasan interen tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ada sehingga pelaksanaan eksteren yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa keuangan mendapatkan kendala. Kendala tersebut

merupakan temuan yang harus dikembalikan oleh kas Negara, yang mengakibatkan beban terhadap pegawai yang melakukan tugas tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi administrasi perencanaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Tengah sudah berjalan dengan baik. Sementara Organisasi, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengorganisasian sudah sesuai dengan prosedur yang ada serta pelaksanaannya sudah cukup baik, namun masih perlu adanya pengembangan dan peningkatan terhadap tata kerja dalam organisasi tersebut.

Actuating (Menggerakkan) dalam hal menggerakkan pegawai dalam organisasi sudah berjalan dengan baik, namun masih terkendala dengan masih adanya pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Sedangkan *Controlling* (Pengawasan), pengawasan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sudah berjalan tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) karena pengawasan dilakukan setelah akhir tahun, yang seharusnya dilaksanakan setiap semester bulan berjalan, dengan pengawasan diakhir tahun menyebabkan temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yang menjadikan pegawai yang melaksanakan tugas tersebut menjadi beban untuk mengembalikan akibat kesalahan tersebut ke Kas Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1]. Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta

- [2]. Gie. T. L. (2003). Efisiensi untuk Meraih Sukses. Psikologi & Pengembangan Diri
- [3]. Moekijat. (1989). *Manajemen Kepegawaian*. Mandar. Bandung.
- [4]. Moleong. L. J. (2010). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- [5]. Nawawi. (2002). *Pengawasan Intern*. Alfabeta
- [6]. Nawawi. H. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- [7]. Riduwan. (2010). Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Alfabeta. Bandung.
- [8]. Siagian. S. P. (2003). *Teori & praktek kepemimpinan*. Rineka Cipta. Jakarta
- [9]. Siagian. S. P. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- [10]. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- [11]. Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B. Alfabeta. Bandung.
- [12]. Terry. G. R. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Penerbit Kencana. Jakarta.

Dokumen

- [13]. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- [14]. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah